

SERI PENGEMBANGAN No. 11 TAHUN 1990

PROSIDING SIMPOSIUM I HASIL PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN TANAMAN INDUSTRI

BUKU V

TANAMAN SERAT BUAH

Caringin-Bogor, 25 s/d 27 Juli 1989



Penyunting
Hobir
Suratman
Sudarisman
S. Damanik
Tri Haryani Savitri
Monica Sri Surani



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN INDUSTRI

STUDI KASUS PELAKSANAAN IKR DI KABUPATEN JENEPONTO SULAWESI SELATAN

Suko Adi Wahyuni dan Sri Hartiniadi Isdijoso
Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat

PENDAHULUAN

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu diantara 23 daerah tingkat II (Dati II) dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan terletak di ujung selatan bagian barat.

Luas daerah Kabupaten Jeneponto 737,64 km² atau 1,18% dari luas Sulawesi Selatan, terdiri dari lima kecamatan yaitu kecamatan Bangkala (202,10 km²), Tamalatea (145,00 km²), Batang (103,63 km²) dan Kalara (102,25 km²).

Keadaan topografi daerah bergelombang dan berbukit-bukit serta sebagian besar wilayahnya adalah berupa lahan kering. Jenis tanah di Kabupaten ini ada beberapa macam antara lain *Alluvial*, *Grumusol*, dan *Regosol*. Luas potensi lahan pertanian ± 39,055 ha yang terdiri dari lahan kering seluas 27,671 ha dan awah 11,384 ha. Penggunaan lahan di Kabupaten Jeneponto adalah untuk pertanian, peternakan dan perikanan, hutan negara, pekarangan dan masih ada lahan yang belum diusahakan. Menurut OLDEMAN daerah ini mempunyai tipe iklim D3 dan E4.

Pada akhir tahun 1986 jumlah penduduknya tercatat sebanyak 255.335 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,1%, sedangkan kepadatan penduduk geografis 346 jiwa/km². Pendapatan tiap kapita tiap tahun penduduknya rata-rata Rp.234.255,- yang berarti di bawah rata-rata Sulawesi Selatan (Rp. 318.746,-).

Mata pencaharian penduduk sebagian besar dari sektor pertanian. Komoditas pertanian yang utama adalah jagung dan padi. Selain komoditas tersebut diusahakan juga tanaman kacang tanah, kacang hijau dan kedelai serta kapas.

Pada awal pengembangan tanaman kapas di Sulawesi Selatan, daerah Jeneponto merupakan daerah pengembangan pertama. Pada tahun 1972/1973 tanaman kapas diusahakan oleh petani melalui bimbingan PKNT (Proyek Kapas Nusa Tenggara) yang meliputi tiga kecamatan (Binamu, Batang dan Kelara) seluas 47,10 ha. Selanjutnya pada tahun 1973/1974 pola pengembangan kapas rakyat dibimbing oleh Perusahaan Umum Perkebunan Kapas (Perum Kapas). Pada masa Perum Kapas, sistem pertanaman kapas yang dilakukan ada dua macam, yakni :

- a. Sistem kapas rakyat.
Dalam hal ini pertanaman kapas dilakukan oleh rakyat dengan mendapat bimbingan dan kredit berupa uang dan sarana produksi dari Perum Kapas.
- b. Sistem kapas perusahaan.

Pertanaman kapas dilakukan oleh Perum Kapas sendiri pada lahan milik Perum. Penanaman kapas pada masa itu dapat dikatakan kurang berhasil, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

- a. Penyediaan kredit (uang dan sarana produksi) sering terlambat sehingga banyak pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Hasil kapas petani tidak dapat segera dibeli/dibayar, waktu pembayaran sering tertunda sampai beberapa bulan.
- c. Harga sarana produksi dalam paket relatif tinggi karena belum adanya subsidi pemerintah.

Akibat dari keadaan tersebut, maka gairah petani untuk menanam kapas sangat kurang. Karena Perum Kapas kurang berhasil, maka sejak tahun 1978/1979 dilakukan pengembangan kapas rakyat dengan pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) yaitu Program Intensifikasi Kapas Rakyat dan sebagai pengelola adalah PTP XXIII. Areal kapas di Kabupaten Jeneponto terus berkembang, tersebar di lima kecamatan dengan rata-rata areal selama tiga tahun (1984/1985/1986/1987) adalah 5644 ha dengan produktivitas 651 kg/ha kapas berbiji. Produktivitas tertinggi dicapai pada tahun 1984/1985 (925 kg kapas berbiji/ha) dengan areal 4.137 ha.

Untuk tercapainya produktivitas yang tinggi, selain syarat teknis pertumbuhan kapas harus dipenuhi, juga diperlukan kelancaran kegiatan non teknis yang meliputi kegiatan perangkat kelembagaan di bidang penyuluhan, bimbingan teknis, perkreditan, penyaluran sarana produksi serta pemasaran hasil. Perangkat kelembagaan yang terkait di dalam sistem produksi IKR di Kabupaten Jeneponto adalah : Petani, Pengelola, Bank, PT. Pertanian, Dinas Perkebunan, Satuan Pelaksanaan Bimas dan Pemerintah Daerah. Apabila seluruh sistem ini berjalan baik, maka diharapkan produktivitas akan dapat tercapai sebagaimana diharapkan yaitu minimal 1 ton kapas berbiji tiap hektar.

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pelaksanaan IKR
 - b. Mengetahui teknik budidaya petani IKR
 - c. Mengetahui pendapatan petani yang menanam kapas dan yang menanam palawija.
- Penelitian dilakukan mulai bulan Pebruari sampai dengan Mei 1988.

METODE PENELITIAN

Penentuan daerah penelitian

Daerah penelitian ditentukan secara sengaja ("purposive") yaitu daerah Kabupaten Jeneponto (Sulawesi Selatan). Dari satu Kabupaten dipilih dua kecamatan (Kelara, Batang) dan dari setiap kecamatan dipilih dua desa (Tolo, Taroan, Tino, Bantarang) yang mempunyai areal tanaman kapas terluas.

Pengambilan contoh

Pengambilan contoh petani dilaksanakan dengan cara "Stratified Random Sampling". Petani dibedakan dalam dua kelompok yaitu petani penanam kapas dan penanam palawija.

Jumlah seluruh sampel petani 120 orang, dengan perincian 80 orang petani yang menanam kapas dan 40 orang petani yang menanam palawija. Penentuan jumlah pengambilan sampel petani, didasarkan pertimbangan bahwa jumlah tersebut sudah dapat mewakili masing-masing kelompok.

Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan petani sampel berdasarkan daftar pertanyaan (questioner) yang telah disediakan. Data sekunder diperoleh dari Dinas, Lembaga dan Instansi yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu PT. Perkebunan XXIII, PT. Pertani, Bank Export Import Indonesia, Dinas Perkebunan. Selain itu juga ditunjang dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak.

Metoda Analisa

Dari masing-masing kelompok petani dihitung pendapatan dari usahataniya selama satu tahun pada lahan yang diusahakan, selanjutnya dikonversi menjadi satu hektar. Fungsi pendapatan adalah :

$$Y = R - C \\ = P_q \cdot Q - \sum X_i \cdot P_{xi}$$

dimana :

- Y = pendapatan
- R = jumlah penerimaan
- C = jumlah pengeluaran
- P_q = harga produk tiap unit
- Q = jumlah produksi
- X_i = sarana produksi ke i
- P_{xi} = harga sarana produksi ke i tiap unit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan IKR ditinjau dari instansi yang terkait

Pelaksanaan Program IKR di Kabupaten Jeneponto melibatkan berbagai instansi yang masing-masing bergerak dibidang : pembinaan petani (pengelola yaitu PTP XXIII), penyuluhan (Dinas Perkebunan setempat), perkreditan (DEII), penyaluran sarana pro-

duksi (PT. Pertani), pemasaran hasil (PTP XIII), dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Bimas setempat.

Koordinasi antara instansi yang terkait belum berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga mengakibatkan sistem produksi tersebut kurang mantap. Hal ini terlihat dari berbagai masalah yang timbul antara lain :

1. Pembinaan petani untuk melakukan sapa usaha sulit dilakukan, karena belum dapat dibentuk kelompok petani hamparan. Pembentukan kelompok hamparan menemui kesulitan karena domisili petani dengan lahannya berjauhan. Kelompok yang ada sekarang adalah kelompok domisili, yang fungsi utamanya mempermudah membagi sarana produksi (benih, pupuk, pestisida).
2. Pelayanan sarana produksi (pupuk, benih, pestisida) kepada petani belum dapat tepat waktu sampai di petani, hal ini karena sarana transportasi (jalan) pada beberapa lokasi masih buruk keadaannya.
3. Pemberian uang garapan sangat terlambat, keadaan ini disebabkan oleh karena pengajuan uang garapan dari pihak pengelola ke Bank sudah terlambat, yaitu menunggu petani selesai tanam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya pengunduran diri dari petani yang sudah mendaftar tetapi tidak jadi bersedia menanam kapas. Alasan petani mengundurkan diri disebabkan antara lain karena masih mempunyai hutang kredit tahun yang lalu yang belum lunas, sehingga bila akan menanam kapas lagi takut akan menambah hutang. Disamping itu ada penyuluhan dari Dinas Tanaman Pangan agar petani menanam ubi kayu, yang hasilnya lebih baik daripada kapas. Selain pengajuan uang garapan dari pengelola ke Bank terlambat, prosedur administrasi perbaikan memerlukan waktu yang lama karena Bank diwajibkan untuk menyeleksi calon peserta. Sedangkan jumlah peserta dan penunggak kredit cukup banyak. Seringkali persyaratan-persyaratan calon peserta tidak secara lengkap diajukan. Akibat keterlambatan pencairan kredit ini maka animo petani untuk menanam kapas menurun. Dengan menurunnya jumlah petani pengikut IKR mengakibatkan tidak tercapainya target areal yang telah ditentukan. Jumlah petani dan areal IKR di Kabupaten Jeneponto tahun 1986/1987 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan areal yang seharusnya 5455,8 ha menurun menjadi 5134,05 ha. Dilain pihak pengelola telah melakukan pembelian sarana produksi (pupuk dan pestisida) kepada PT. Pertani berdasarkan luas pendaftaran. Namun karena target tidak tercapai maka terpaksa pestisida dan pupuk tidak diambil seluruhnya, dan ini menyebabkan terjadinya "carry over" di PT. Pertani. Apabila "carry over" tersebut berupa pupuk tidak menjadi masalah karena pupuk bisa diberikan ke tanaman pangan. Tetapi bila "carry over" itu pestisida maka terpaksa ditumbun di gudang saja dengan harapan akan dapat dipakai di tahun yang akan datang. Karena pestisida IKR hanya dapat dipakai untuk kapas. Menurut SK. Mentan tahun 1985 bahwa penggunaan pestisida harus mendahulukan sisa persediaan MT 1985/1986. Pada tahun 1985/1986 dan tahun

1986/1987 terjadi "carry over" pestisida Hostathion ULV 15.595 lt. dan Sherpa 18.069 ton, yang belum ditangani lebih lanjut.

Tabel 1. Jumlah petani dan areal terdaftar dan tertanam Program IKR di Kabupaten Jeneponto musim tanam 1986/1987.

Kecamatan	Pendaftaran		Penanaman	
	Petani (orang)	Luas (ha)	Petani (orang)	Luas (ha)
Bangkala	3138	993,7	2904	915,45
Tamalatea	2157	580,45	2106	566,25
Binamu	3172	760,30	3062	721,25
Kelara	5064	2098,35	4710	1993,65
Batang	3882	1023	3508	937,45

Sumber : PTP XXIII, Kabupaten Jeneponto.

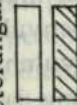
4. Pengelola diwajibkan membeli seluruh hasil kapas petani dan memotong pembayaran pengembalian kredit. Beberapa petani tidak langsung menjual kapasnya kepada pengelola, tetapi menitipkan hasil kapasnya kepada petani lain untuk menghindari kewajiban mengembalikan kredit sehingga mengakibatkan tunggakan kredit membengkak. Kadang-kadang pembelian kapas oleh pengelola terlambat, dikarenakan pada masa puncak pembelian sulit untuk membagi tenaga maupun sarana angkutan ke setiap lokasi, disebabkan terbatasnya jumlah tenaga maupun sarana angkutan.
5. Untuk kegiatan penyuluhan yang seharusnya dilakukan antara Pengelola dengan Dinas Perkebunan, tetapi pelaksanaannya dilakukan masing-masing. Dinas Perkebunan memberi penyuluhan kepada petani peserta IKR selama masa pendaftaran, melalui mesjid-mesjid tiap hari Jum'at. Materi penyuluhan antara lain penjelasan-penjelasan mengenai :
 - a) masalah kredit, b) teknik bercocok tanam kapas, c) pasca panen. Pengelola memberi penyuluhan kepada ketua kelompok pada saat pemberian premi produksi. Materi penyuluhan antara lain :
 - a) tanggung jawab sebagai ketua kelompok, b) teknik bercocok tanam kapas.

Dari uraian di atas maka secara skematis rencana dan realisasi pelaksanaan IKR di Kabupaten Jeneponto seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skema rencana pelaksanaan IKR dan realisasinya di Kabupaten Jeneponto MT. tahun 1986/1987.

Kegiatan	Bulan									
	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4. 5 . 7. 8. 9.	
1. Pendaftaran petani oleh (PTP XXIII)										
2. Kontrak kerja antara Pengelola dengan PT. Pertanian										
3. Penyerahan DPPP ke BEII										
4. Petani menerima paket kredit										
5. Petani tanam kapas.										
6. Panan/pembelian kapas oleh Pengelola										

Keterangan :



: Rencana pelaksanaan kegiatan A: Sarana produksi
 : Realisasi pelaksanaan kegiatan B: Uang garapan.

Pelaksanaan IKR ditinjau dari petani

Tanaman kapas sudah diperkenalkan kepada petani di daerah Jeneponto sejak musim tanam 1972/ 1973. Dengan demikian sebagian petani telah berpenghasilan dalam berusahatani kapas. Sebaran petani sampel mengenai pengalaman tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah petani sampel berdasarkan lamanya menanam kapas di daerah penelitian, tahun 1986/1987.

Jumlah petani	Lama menanam kapas (Tahun)	%
37	1 - 5	46
29	6 - 10	36
14	> 10	18

Sumber : analisa data primer

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengalaman petani berusahatani kapas bervariasi mulai dari yang berpengalaman satu musim tanam, sampai yang sudah berpengalaman sejak masa Perum Kapas. Sebagian besar petani berpendapat bahwa kapas merupakan komoditas yang relatif baru, sehingga budidaya kapas masih belum dikuasai secara baik.

Berdasarkan wawancara dengan petani, rata-rata luas lahannya $\pm 0,4$ ha, yang letaknya jauh dari rumah. Terdapat dua macam pola tanam yaitu a) jagung - kapas - bero, b) jagung - kacang hijau - bero.

Jagung ditanam bulan Nopember, sedangkan kapas ditanam 15 hari sebelum jagung dipanen (kira-kira pertengahan Januari).

Untuk mengusahakan tanaman kapas, petani memperoleh Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) sebesar Rp. 84.165,0 tiap ha, untuk jangka waktu enam bulan. Penerima kredit adalah Bank Ekspor Import Indonesia, bekerjasama dengan PTP XXIII sebagai pengelola. Benih disediakan oleh pengelola, pupuk dan pestisida disalurkan oleh P.T. Petani.

Penyaluran paket kredit, baik berupa uang garapan maupun sarana produksi kurang dapat tepat waktu. Menurut petani seringkali uang garapan tersebut baru diterima 3-4 bulan setelah tanam, sehingga tidak sesuai dengan sasaran, yaitu untuk pengolahan tanah.

Waktu penerimaan uang garapan kepada petani sampel disajikan pada Tabel 4.

Penanaman kapas seharusnya bersamaan dengan pemupukan dasar yaitu TSP dan sebagian Urea. Namun pelaksanaan pemupukan di daerah survei belum tepat, pupuk dasar diberikan pada waktu kapas umur 15 hari. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa masih

perlu menunggu tanaman kapasnya baik karena masih ada tanaman jagungnya.

Pengendalian hama dilaksanakan oleh Ketua Kelompok dengan sistem kalender. Penyemprotan pertama dilakukan pada tanaman umur 45 hari, kemudian dengan interval 7-10 hari, sebanyak 7 kali semprot. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya 43 orang (54 persen) petani mengikuti penyemprotan sampai 2 kali, sebanyak 37 orang (46 persen) mengikuti penyemprotan sampai 3 kali, dan tidak ada yang mengikuti lebih dari 3 kali meskipun penyemprotan sebenarnya sampai 7 kali. Hal ini disebabkan areal kapas dengan tempat tinggalnya berjauhan dan juga petani telah mempercayakan kepada petugas semprot. Di setiap kelompok tani hanya ada seorang petugas semprot dengan satu buah alat semprot, sedangkan areal yang harus disemprot letaknya berjauhan. Akibatnya, bekerjanya petugas semprot kurang efektif dan seringkali rasa tanggung jawabnya kurang karena tidak ada ikatan kepentingan antara petugas semprot dengan petani kapas. Banyak diantara petani yang tidak tahu dengan tepat berapa jumlah insektisida yang telah dipakai menyemprot tanaman kapasnya.

Para petani di Jeneponto menyangi kapasnya 2 kali yaitu pada umur 7-15 hari setelah tanam dan pada umur 20-45 hari setelah tanam.

Panen dilakukan sekitar lima bulan setelah tanam, produksi rata-rata yang dihasilkan oleh petani pada tahun 1986/1987 sebesar 174 kg/ha kapas berbiji. Rendahnya produksi ini disebabkan karena serangan hama *Heliothis sp.* Pembelian kapas dilakukan oleh PTP XXIII sebagai pengelola IKR di Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 400,-/kg kapas berbiji (SK Mentan 1986). Dalam keadaan ekonomi petani yang lemah, sangat diharapkan bahwa produk yang dihasilkan dapat segera dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun petani sudah siap menjual tetapi karena waktu penjualan kapas ditentukan oleh pengelola, maka petani terpaksa harus menunggu. Seringkali pembelian oleh pengelola terlambat, akibatnya banyak petani yang menjual kapasnya ke petani lain karena kebutuhannya sangat mendesak. Didalam berusaha tani Kapas petani juga menerima penyuluhan dari Dinas Perkebunan. Frekuensi petani mengikuti penyuluhan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Waktu penerimaan uang garapan kepada petani sampel.

Waktu penerimaan uang garapan	Jumlah petani	%
90 HST *)	29	36
120 HST	51	64

Keterangan :

Sumber : analisa data primer

*) : Hari Setelah Tanam

Tabel 5. Frekuensi petani mengikuti penyuluhan di daerah penelitian.

Jumlah mengikuti penyuluhan	Jumlah petani	%
1 kali	—	—
2 kali	47	59
3 kali	20	25
4 kali	9	11
5 kali	4	5

Sumber : analisa data primer.

Tabel 5 menunjukkan bahwa kebanyakan petani hanya mengikuti penyuluhan sebanyak 2 kali (59%).

Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani kapas dan palawija dihitung dari selisih penerimaan (harga x produksi) dengan biaya variabel yaitu benih, pupuk, pestisida dan upah tenaga kerja.

Besarnya pendapatan petani kapas dan yang menanam palawija (kacang hijau) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6, menunjukkan bahwa pendapatan petani dari tanaman kapas menderita rugi (Rp. 33.615,—), hal ini akibat produksi yang rendah yaitu 174 kg/ha yang disebabkan karena banyaknya serangan hama *heliiothis* sp. Apabila tidak mengalami gangguan hama, diharapkan petani dapat mencapai produksi kapas sebesar 1000 kg/ha dengan harga Rp 400,—/kg, sehingga petani kapas dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp. 296.785,— (Anon., 1982). Dengan demikian bila dibandingkan dengan pendapatan petani kacang hijau, maka kapas lebih menguntungkan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Program IKR di Kabupaten Jeneponto masih menemui berbagai hambatan, terutama karena lemahnya koordinasi antara instansi yang terkait, keadaan sosial ekonomi petani dan masalah teknis yang belum dapat diatasi yaitu pengendalian hama.
2. Prosedur administrasi diberbagai instansi terkait dalam Program IKR, terutama di Pengelola dan Bank menyebabkan terlambatnya penerimaan kredit uang garapan kepada petani, sehingga sasaran pemberian kredit tersebut tidak tercapai.
3. Pembentukan kelompok hamparan yang merupakan kunci terlaksananya penerapan sapa usaha tani kapas belum dapat dibentuk.
4. Petani masih ragu-ragu mengusahakan tanaman kapas karena berbagai resiko yang mungkin dihadapi dan dirasa masih ada tanaman lain yang lebih menguntungkan.
5. Pengendalian hama kapas masih sangat lemah baik dilihat dari segi organisasinya maupun tekniknya.
6. Penyuluhan kepada petani oleh Pengelola dan Dinas Perkebunan setempat kurang terpadu pelaksanaannya.
7. Pendapatan usaha tani jagung-kacang hijau pada tahun 1986/1987 lebih besar daripada kapas-jagung, karena produktivitas kapasnya sangat kecil berhubung adanya hama *Heliothis* sp. yang menyerang sangat kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambo Ala, 1988. Masalah kapas di Sulawesi Selatan. Disajikan pada seminar Masalah Khusus Bapedda. Sul – Sel.
- Anonimus, 1982. Kelayakan Pengusahaan Kapas ditinjau dari penghematan sumberdaya domestik.
- Anonimus, 1985. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas. Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat dan Intensifikasi Kapas Rakyat MT 1986/1987.
- Anonimus, 1988. Peningkatan Keterpaduan Pelaksanaan Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR) di Kabupaten Jeneponto. Disajikan pada acara Temu Karya Teknis IKR.
- Entis Sutisna, et al., 1987. Beberapa Masalah Dalam Pelaksanaan Intensifikasi Kapas Rakyat di Sulawesi Selatan. Tidak diterbitkan.
- Flint, et al., (tanpa tahun), Enterprice, Partial and Parametric Budgets dalam Basic Economic and Statistical 7001 for Agricultural Research Institute, Los Banos.

DISKUSI

Budi H. (Balitnak Bogor)

Tanya :

Menurut pendapat ibu, bagaimana kira-kira prospek pengembangan kapas rakyat secara umum ? Mohon diberikan gambaran dan terima kasih.

Jawab :

Pengembangan kapas akan dapat berhasil apabila hambatan non teknis dapat diatasi dan dari segi teknis perlu dicari lahan-lahan yang lebih sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman kapas tersebut.

B. Trijono (Balai Tekstil)

Tanya

1. Melihat hasil pengembangan produksi melalui program IKR yang cukup memprihatinkan ditinjau dari alasan teknis budidaya maupun non teknis yang telah dirasakan akibatnya. Bagaimana usaha pengembangannya bilamana dilakukan secara profesional melalui suatu penangan tersendiri ? Mohon penjelasan.
2. Dari hasil penelitian diatas yang mengambil sample lokasi di Jeneponto, apakah sebelumnya sudah dilakukan penelitian pendahuluan untuk meneliti/melihat pola hidup petaninya, yang menurut kami akan sangat berpengaruh terhadap sistem pengaturan petani dalam menunjang peningkatan produktivitas hasil kapas ? Mohon penjelasan.

Jawab :

1. Pengelolaan secara profesional memang sangat diperlukan untuk menangani IKR. Pengelola harus mempunyai tenaga yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup perihal kapas serta mengetahui aspirasi petani. Pengelola harus diberi keleluasaan untuk menyediakan sarana produksi (pupuk, benih, pestisida) sehingga tepat jumlah dan tepat waktu. Kredit dari Bank supaya berbentuk KUT (kredit Usaha Tani) jadi bukan Kredit Komoditas.
2. Telah diadakan survei pendahuluan di Jeneponto.

Soewardjiman (PN Perkebunan XIX)

Tanya :

Kita boleh bergembira karena sudah bisa menemukan kendala pelaksanaan program IKR

di Sulawesi Selatan. Selanjutnya kendala ini kita sebut saja faktor pembatas. Seandainya faktor pembatas tersebut sudah dapat diatasi, sebenarnya bagaimanakah pendapatan petani kapas? Maksudnya usaha tani kapas ini lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan usaha tani tradisionalnya disitu?

Seandainya usahatani kapas lebih menguntungkan maka tidak ada jalan lain kecuali tindakan mengatasi faktor pembatas tersebut diatas untuk/guna perbaikan pelaksanaan program IKR.

Jawab :

Apabila target produktivitas 1 ton kapas tiap ha tercapai, maka pendapatan petani kapas akan lebih tinggi dibandingkan usahatani tradisionalnya (jagung, ketela pohon).

B. Wiyono (PTP CCI-CCII Persero).

Saran

Untuk mengatasi masalah uang garapan dan saprodi seharusnya dapat dipinjami terlebih dahulu oleh pengelola PTP XXIII) dengan syarat :

- luas areal yang direncanakan telah dapat dibekukan.
- disetujui oleh Satpelbimas.

Jawab :

Saran tersebut perlu diteruskan ke PTP XXIII.

Emmyzar (Balitro)

Tanya .

1. Dengan adanya hambatan non teknis dalam IKR apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya ?
2. Untuk menanggulangi atau mengurangi kebutuhan nasional akan kapas, apakah bisa dilakukan pemilihan alternatif komoditas serat lain ? Sudah sejauh mana penelitian untuk ini ?

Jawab :

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dan meningkatkan pengawasan oleh penanggung jawab program IKR.
2. Alternatif komoditi tersebut adalah rami, tetapi harga rami yang dibuat menjadi serat pendek seperti kapas lebih tinggi daripada serat kapas.

Hadi Pratomo (PTP XXIII Ujung Pandang.)

Tanya :

Diinformasikan Pabrik Kertas Gowa di Sulawesi Selatan akan memanfaatkan limbah batang kapas untuk bahan baku kertas. Sejauh mana yang dapat direkomendasi dari Balittas untuk hal tersebut? Terhadap petani kapas hal tersebut mempunyai nilai tambah. Mohon komentar.

Jawab :

Penggunaan batang kapas sebagai sumber bahan baku kertas tidak ekonomis karena jumlahnya yang masih terbatas dan mahal biaya investasi, mesin-mesin.